

ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Anyualatha Haridison ¹, Diano Permana ²

^{1,2}Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Palangka Raya,
Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya (73111A), Kalimantan Tengah, Indonesia
E-mail: a.haridison@fisip.upr.ac.id Telp: +628115200187

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan tahun 2014-2018 yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah, kemudian hasilnya tersebut digunakan kembali untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan naik turunnya rasio keuangan daerah Kabupaten Barito Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan menggunakan rasio keuangan daerah mengalami penurunan, sehingga masih perlu peningkatan yang ekstra karena orientasi anggaran yang tercermin dari tinjauan kelima rasio masih belum terfokus pada kepentingan publik. Rasio Kemandirian dengan rata-rata hanya 6,09% dimana menunjukkan kriteria instruktif, Rasio Efektifitas dengan rata-rata per tahun 91,47% yang mana tidak mencapai target, Rasio Efisiensi dengan rata-rata per tahun 2,18% sangat efisien dikarenakan biaya pungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih kecil daripada biaya realisasi PAD. Rasio Aktivitas Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung rata-rata per tahunnya 76,36% dan 20,93%, serta Rasio Pertumbuhan dengan rata-rata per tahun sebesar 34,01%. Penelitian ini berimplikasi pada tantangan prinsip performance budget dan kinerja atau kemampuan keuangan daerah Kabupaten Barito Selatan untuk dilakukan perbaikan pada sisi publik pada tahun selanjutnya.

Kata kunci: Rasio Keuangan Daerah, Kinerja Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL RATIO IN ASSESSING THE PERFORMANCE OF REGIONAL REVENUES AND EXPENDITURE BUDGET OF SOUTH BARITO REGENCY

Abstract

This research aims to know and analyze the performance of the regional expenditure budget of South Barito Regency in 2014- 2018 which is measured using the regional financial ratios, then the result is re-used To know and analyze the factors that led to the rise in the financial ratios of South Barito Regency. This research is a qualitative study. The results of the study showed the performance of the local government of Barito South District using the financial ratios of the region decreased, so there still needs to be an increase in the excitement because the orientation of the budget reflected in the fifth review ratio is still not focused on the public interest as it should be. Where the Ratio of Independence with an average of only 6.09% which shows the instructive criteria, the Effectiveness Ratio with an average per year of 91.47% which does not reach the target, the Efficiency Ratio with an average annualized 2.18% is very efficient because the cost of local original income (PAD) is smaller than the cost of realization of PAD, the ratio of direct spending activity and indirect spending on average per year is 76.36% and 20.93%, and the growth ratio with an average annual rate of 34.01%. This research has implications for the challenges of the performance budget principle and the performance or financial capacity of the South Barito Regency to make improvements on the public side in the following year.

Keywords: *Regional Financial Ratio, Budget Performance, Regional Revenues and Expenditure Budget, Original Local Government Revenue*



PENDAHULUAN

Penetapan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 oleh pemerintah, mengenai Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, Undang-Undang ini diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada Pemerintah Pusat) ke pertanggungjawaban horisontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Pasca reformasi terdapat paradigma baru dalam manajemen anggaran daerah. Suatu paradigma yang menuntut lebih besarnya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan anggaran, dan dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Aspek utama budgeting reform adalah perubahan dengan penerapan *performance budgeting* (Mardiasmo, 2018).

Dalam UU Nomor 17 tahun 2003

tentang Keuangan Negara, disebutkan di pasal 3 ayat (1) bahwa keuangan negara dikelola secara transparan. Berkenaan akuntabilitas, disebutkan di pasal 30 dan 31 yang menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan negara harus berorientasi kepada hasil. Hal senada juga terdapat pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian dalam PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai salah satu peraturan pelaksana dari UU Nomor 23 tahun 2014, Bab XI di pasal 283 ayat (2) bahkan lebih luas dan tegas lagi, yang mensyaratkan agar keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (PP Nomor 58 tahun 2005, pasal 4).

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akun-

tabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas yang bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumberdaya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2018).

Pengelolaan keuangan negara dan daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia (Telly, 2010). Karena itu penggunaan analisis Kinerja Keuangan sebagai alat keuangan secara luas sudah harus diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Maka itu perlu suatu perubahan yang mengacu pada penggunaan analisis Kinerja Keuangan dalam pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Kerasian, dan Rasio Pertumbuhan (Halim, 2012).

Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu Pemerintah Daerah yang telah menyelenggarakan otonomi daerah, tetapi dalam pengelolaan keuangannya masih perlu dilakukan peningkatan. Rendahnya tingkat rasio kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan terjadi dikarenakan meningkatnya pemberian dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yang artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan dapat dikatakan belum mampu dalam menggunakan dana dari pendapatan asli daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah tersebut. Dengan kata lain Pemerintah Daerah masih bergantung dengan dana dari Pemerintah Pusat guna menjalankan kegiatan daerah. Rasio Kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari Pemerintah Pusat dan pada penelitian ini sangat menarik karena kita akan melihat secara menyeluruh mengenai bagaimana hasil penghitungan rasio dan keadaan kinerja



DOI 10.34010/agregasi.v9i2.5396

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

keuangan daerah di Kabupaten Barito Selatan.

Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu Pemerintah Daerah yang telah menyelenggarakan otonomi daerah, tetapi dalam pengelolaan keuangannya masih perlu dilakukan peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan rasio kemandirian selama 3 tahun terakhir, didapat perhitungan sebagai data awal yang dilakukan penulis, diketahui seperti pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1. Penghitungan Rasio Kemandirian

T.A.	Realisasi PAD	Pendapatan Transfer	RKKD (%)
2014	32.814.636.483	744.012.587.441	4,41
2015	38.343.109.568	813.780.594.804	4,71
2016	44.019.869.814	861.770.133.083	5,10

Sumber: data diolah, 2019.

Rendahnya tingkat rasio kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan terjadi dikarenakan meningkatnya pemberian dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yang artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan dapat dikatakan belum mampu dalam menggunakan dana dari pendapatan asli daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah tersebut. Dengan kata lain Pemerintah Daerah masih bergantung dengan dana dari Pemerintah Pusat guna menjalankan kegiatan daerah. Rasio Kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari Pemerintah Pusat. Jadi Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan secara keseluruhan dapat dikatakan masih rendah. Hasil penelitian ini sangat menarik karena kita akan melihat secara menyeluruh mengenai bagaimana hasil penghitungan rasio dan keadaan kinerja keuangan daerah di Kabupaten Barito Selatan.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Lazyra KS (2016) dengan judul *Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*, dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dengan menggunakan rasio keuangan daerah mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan daerah dan meningkatnya belanja daerah, bahkan melebihi dari yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan, selain itu juga Pemerintah Daerah Kota Medan tidak mampu meningkatkan dan mengelola hasil pendapatan asli daerah, sehingga Pemerintah Daerah Kota Medan masih harus bergantung dengan dana Pemerintah Pusat.

Sekali lagi dengan konsep pengukuran kinerja dengan analisis rasio, membawa manfaat yang sangat penting dalam menilai akuntabilitas

organisasi dan manajemen publik secara khusus dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah, dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan ekonomis untuk kepentingan masyarakat di daerah (Wibisono, 2011). Mengapa pengukuran ini penting juga diperkuat oleh banyaknya persoalan yang berkembang seperti irasionalitas, penyimpangan dan penyalahgunaan (Pazri, 2016).

Daya tarik atau *highlight* yang akan membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah tidak terhentinya pada pembahasan yang dilakukan secara parsial dari setiap rasio, yang mengakibatkan pembaca tidak akan mendapatkan garis besar tentang bagaimana sebenarnya kinerja keuangan daerah itu dalam keadaan baik atau tidak, artinya informasi yang didapat tersebut juga tidak diterima secara utuh dan tidak menjawab langsung pada pokok masalah. Dan melalui penelitian inilah penulis menjawab dengan melakukan pembahasan analisis yang mendalam secara menyeluruh dimana pengukur kinerja keuangan dari setiap rasio dikaitkan satu sama lain secara kompleks sehingga didapatkan dampak sebab-akibat atau implikasi antar rasio yang saling mempengaruhi satu sama lain, dan hal ini jugalah yang harus diperkuat di segala jenis penelitian serupa kedepannya.

Hal menarik lainnya adalah bahwa melalui penelitian ini adalah didapat manfaat bagaimana melihat, menilai dan

menganalisis sendiri pengukuran Kinerja Keuangan pemerintah daerah, terlihat bahwa pengukuran Kinerja Keuangan akan sangat berguna dalam meningkatkan mutu pengambilan keputusan pemerintah, meningkatkan perencanaan strategi dan penetapan tujuan, serta memungkinkan suatu entitas untuk menentukan sumberdaya secara efektif dan berpihak kepada rakyat yang mana harus diterapkan secara menyeluruh dalam aspek penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Temuan yang didapat dari penelitian ini secara garis besar untuk Kabupaten Barito Selatan disini peran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mengambil peran yang besar dalam total belanja meskipun ada kenaikan tipis tiap tahunnya dan daerah belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap total belanja daerah dan pertumbuhan PAD secara keseluruhan sangat kecil, keterkaitan lain terkait dengan hal ini yang dapat kita lihat adalah rendahnya rasio kemandirian sebagai akibat kecilnya sumbangan PAD terhadap total belanja daerah juga semakin membuat daerah bergantung dan menjadikan dana transfer sebagai modal utama bagi pembiayaan daerahnya.

Rasio kemandirian yang sangat rendah ini juga dibuktikan lagi dengan ketidakmampuan merealisasikan PAD untuk dapat mencapai target dimana rasio efektivitas berada pada kategori yang

hanya cukup, karena dari tahun 2014 - 2017 realisasi selalu berada dibawah target anggaran yang ini tentu saja melemahkan dari segi pendapatan daerah dan membuat ketergantungan yang cukup besar dengan Pemerintah Pusat.

Temuan baru yang penulis juga dapatkan bahwa pertumbuhan PAD yang tergambar dalam rasio pertumbuhan yang selalu positif tidak menjamin atau tidak begitu memiliki pengaruh signifikan untuk menunjang segala kegiatan, pembangunan, atau pembiayaan daerah lainnya secara maksimal bahkan untuk sekedar meningkatkan secara persentase dari kinerja keuangan daerah.

Dan dalam rasio efisien yang terlampau sangat efisien juga tidak terlalu berdampak baik pada keefektifan, karena masih dalam kategori cukup selama empat tahun awal, karena disini PAD yang terealisasi dengan biaya pemungutan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan itu tidak menghasilkan capaian target anggaran seharusnya.

METODE

Studi ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat

serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Moelong, 2017). Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan kinerja keuangan serta kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan yang diukur melalui perhitungan rasio keuangan berdasarkan data APBD yang diperkuat dengan hasil wawancara dan disajikan dalam bentuk tulisan secara sistematis, sehingga akan diketahui makna sebenarnya. Selanjutnya akan disimpulkan secara menyeluruh hasil dari Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2018.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Barito Selatan, dari bulan Maret sampai dengan Mei 2019. Subjek penelitian ini adalah BPKAD Kabupaten Barito Selatan, mencakup pejabat struktural, ASN terkait. Sedangkan objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi topik permasalahan yang dikaji, yakni, Kinerja APBD Kabupaten Barito Selatan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan, data yang dikumpulkan dengan melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Selatan. Prosedur pengumpulan data

diperoleh berdasarkan hasil wawancara langsung di lokasi penelitian dengan nara sumber terkait. Serta data sekunder dari referensi data dari buku, jurnal, dokumen, aturan-aturan yang berkaitan dengan topik penelitian dan secara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2018.

Teknik analisis data menggunakan penghitungan Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, rumus penghitungan analisis rasio adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\% \quad (\text{a})$$

2. Rasio Efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\% \quad (\text{b})$$

3. Rasio Efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \quad (\text{c})$$

4. Rasio Aktivitas:

$$\text{Rasio belanja rutin di APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\% \quad (\text{d})$$

$$\text{Rasio belanja pemb. di APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pemb.}}{\text{Total APBD}} \times 100\% \quad (\text{e})$$

5. Rasio Pertumbuhan:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{realisasi penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\% \quad (\text{f})$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan TPD} = \frac{\text{realisasi penerimaan TPD } X_n - X_{n-1}}{\text{realisasi penerimaan TPD } X_{n-1}} \times 100\% \quad (\text{g})$$

Dimana:

$(X_n - X_{n-1})$ = Realisasi penerimaan tahun yang dihitung dikurangi tahun sebelumnya.

$(X_n - 1)$ = Realisasi penerimaan tahun sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Kabupaten Barito Selatan

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian maka mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan terhadap bantuan eksternal (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya (Halim, 2012:232).

Tabel 1. Kriteria Rasio Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	26% - 50%	Konsultatif
Sedang	51% - 75%	Partisipasif
Tinggi	76% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim (2007)

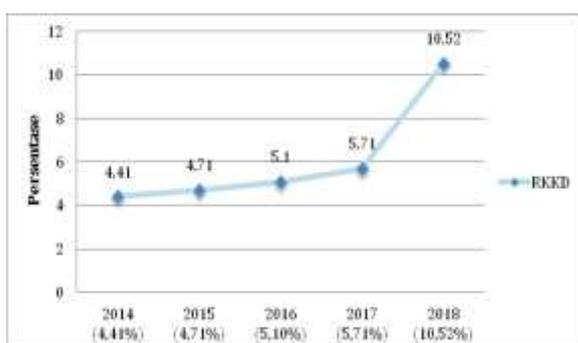
Tabel 2. Penghitungan Rasio Kemandirian

T.A.	Realisasi PAD	Pendapatan Transfer	RKKD (%)	Pola Hubungan
2014	32.814.636.483	744.012.587.441	4,41	Instruktif
2015	38.343.109.568	813.780.594.804	4,71	Instruktif
2016	44.019.869.814	861.770.133.083	5,10	Instruktif
2017	49.297.479.852	862.618.701.368	5,71	Instruktif
2018	95.927.863.711	911.628.077.230	10,52	Instruktif

Rata-rata per tahun = 6,09

Sumber: data diolah, 2019.

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 2, kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah dikatakan masih belum mampu melaksanakan penyelenggaraan otonomi). Nilai terendah terjadi pada tahun 2014 dimana nilainya sebesar 4,41% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 10,52%. Tahun-tahun lainnya yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017 masing-masing sebesar: 4,71%, 5,10%, dan 5,71%, serta untuk rata-rata per tahun sendiri rasio kemandiriannya hanya berkisar pada 6,09%.



Gambar 1. Grafik Rasio Kemandirian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 – 2018

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Diketahui jika realisasi PAD Kabupaten Barito

Selatan dari tahun 2014 sampai dengan 2018 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 PAD Kabupaten Barito Selatan sebesar Rp.32.814.636.483 atau sebesar 4,17% dari total pendapatan. Mengalami kenaikan pada tahun 2015 yaitu menjadi Rp.38.343.109.568 atau sebesar 4,49% dari total pendapatan. Pada tahun 2016 PAD Kabupaten Barito Selatan mengalami kenaikan menjadi Rp.44.019.869.814 atau sebesar 4,72% dari total pendapatan. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp.49.297.479.852 atau sebesar 5,29% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan lagi yaitu sebesar Rp.95.927.863.711 atau 9,36% dari total pendapatan.

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pendapatan transfer atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 sebesar Rp.744.012.587.441, kemudian pada tahun 2015 mengalami kenaikan 9,37% atau sebesar Rp.813.780.594.804. Pada tahun 2016 sebesar Rp.861.770.133.083 atau naik 5,89% dari tahun sebelumnya, kemudian mengalami kenaikan lagi sebesar 1% atau menjadi Rp.862.618.701.368 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan sebesar 5,68% atau menjadi Rp.911.628.077.230. Untuk peningkatan pendapatan transfer dari pihak ekstern ini meningkat karena adanya peningkatan pada pos-pos dana perimbangan dari Pemerintah Pusat

seperti : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan DAK (Dana Alokasi Khusus).

Jadi Kemandirian Keuangan Kabupaten Barito Selatan secara keseluruhan dapat dikatakan masih sangat rendah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana transfer masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan ditambah lagi minimnya potensi PAD dari sumber daya alam yang ada sehingga secara keseluruhan DAU lah yang menjadi sumber penerimaan utama daerah dengan kisaran 70% dari total pendapatan. Menurut Saragih (2003:104) bagi daerah yang relatif minim sumber daya alam (SDA), DAU merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung sumber operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Menurut Muliana (2009:97) bahwa PAD mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana transfer seperti DAU dan DAK mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Untuk mengatasi hal berkenaan dengan kemandirian ini, Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada meski terbatas. Inisiatif

dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial dan terus berupaya meningkatkan potensi PAD yang sudah agar dapat jauh lebih besar jumlahnya.

Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Barito Selatan

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang diterapkan berdasarkan potensi riil daerah, semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik (Halim, 2012:234).

Tabel 3. Kriteria Rasio Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100 %	Sangat efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75 %	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2016:141)

Tabel 4. Perhitungan Rasio Efektivitas

T.A.	Realisasi PAD	Target PAD	RE (%)	Kriteria
2014	32.814.636.483	35.130.000.000	93,40	Cukup Efektif
2015	38.343.109.568	44.977.561.577	85,24	Kurang Efektif
2016	44.019.869.814	50.327.409.577	87,46	Kurang Efektif
2017	49.297.479.852	80.928.967.347	60,91	Tidak Efektif
2018	95.927.863.711	73.575.278.369	130,38	Sangat Efektif
Rata-rata per tahun = 91,47				

Sumber: Data diolah, 2019.

Dapat dilihat bahwa rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

untuk tahun anggaran 2014 - 2018 menunjukkan angka yang kurang efektif, di mana pada angka persentase rasio tahun 2014, 2015, dan 2016 masing-masing sebesar 93,40%, 85,24%, dan 87,46%. Akan tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan rasio menjadi 60,91% yang berarti kategori tidak efektif sekaligus yang paling rendah. Setelah penurunan pada tahun 2017 tersebut, ada peningkatan menjadi sebesar 130,38% pada tahun 2018 dan menjadi yang tertinggi selama lima tahun terakhir, serta untuk rata-rata per tahunnya sendiri adalah 91,47%.



Gambar 2. Grafik Rasio Efektivitas Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 - 2018

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD menunjukkan bahwa anggaran PAD Kabupaten Barito Selatan rata-rata selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2018 ada penurunan target anggaran sedikit dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 PAD dianggarkan sebesar

Rp.35.130.000.000 atau 4,34,% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2015 anggaran PAD naik menjadi Rp.44.977.561.577 atau 4,96% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2016 PAD dianggarkan sebesar Rp.50.327.409.577 atau 5,39% dari total anggaran pendapatan. Kemudian pada tahun 2017 anggaran PAD dinaikkan menjadi Rp.80.928.967.348 atau 8,13% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2018 anggaran PAD diturunkan menjadi Rp.72.421.660.169 atau 7,26% dari total anggaran pendapatan.

Namun, untuk memperbaiki agar tidak terjadi lagi besar target dibanding realisasi seperti pada tahun 2014 - 2017, serta mempertahankan dan meningkatkan efektivitas kinerja keuangan yang telah dicapai pada tahun 2018, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Realisasi PAD Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 PAD Kabupaten Barito Selatan sebesar Rp.32.814.636.483 atau sebesar 4,17% dari total pendapatan. Mengalami kenaikan pada tahun 2015 yaitu menjadi Rp. 38.343.109.568 atau sebesar 4,49% dari total pendapatan. Pada tahun 2016

PAD Kabupaten Barito Selatan mengalami kenaikan menjadi Rp. 44.019.869.814 atau sebesar 4,72% dari total pendapatan. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp.49.297.479.852 atau sebesar 5,29% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan lagi yaitu sebesar Rp. 95.927.863.711 atau 9,36% dari total pendapatan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial atau lebih menguatkan peran Perusahaan Daerah yang sudah ada. Daerah diharapkan untuk tidak selalu terpaku dengan target yang telah mereka tentukan sebelumnya dan sekali lagi harus selalu memaksimalkan potensi-potensi PAD di daerah tersebut sehingga bisa melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya.

Secara khusus PAD yang memang sudah menjadi andalan atau jumlahnya sudah besar seperti pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak bumi dan bangunan, serta (pajak) sarang burung walet yang terdata mencapai 4000 bangunan di Kabupaten Barito Selatan,

tinggal bagaimana Pemerintah Daerah bisa memperkuat dan mempertegas regulasinya. Memang kesulitannya adalah pada kesadaran dari wajib pajak, disinilah peran Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan arti pajak kepada masyarakat sehingga nantinya potensi yang ada ini semakin optimal. Danjuga sebaiknya melakukan penetapan anggaran PAD yang didasarkan pada potensi daerah bukan sekedar didasarkan pada target PAD, sehingga perlu dilakukan penataan maupun sensus yang optimal dalam menggali potensi daerah yang ada.

Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Barito Selatan

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh/memungut PAD dengan realisasi penerimaan PAD yang diterima. Untuk dapat menghitung rasio efisiensi PAD ini diperlukan data tambahan, yaitu data tentang biaya pemungutan PAD. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja Pemerintah Daerah sangat begitu baik (Mahmudi,2016:141).

Tabel 5. Kriteria Rasio Efisiensi

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
< 10%	Sangat efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
> 40%	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi (2016)



DOI 10.34010/agregasi.v9i2.5396

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

Tabel 6. Perhitungan Rasio Efisiensi

T.A.	Biaya Pungut PAD	Realisasi PAD	REKD (%)	Kriteria
2014	1.087.600.000	2.814.636.483	3,32	Sangat Efisien
2015	1.298.099.000	38.343.109.568	3,38	Sangat Efisien
2016	789.156.000	44.019.869.814	1,80	Sangat Efisien
2017	686.480.000	49.297.479.852	1,39	Sangat Efisien
2018	890.548.000	95.927.863.711	1,01	Sangat Efisien
Rata-rata per tahun = 2,18				

Sumber: Data diolah, 2019.

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dalam PAD juga diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Kabupaten Barito Selatan tahun 2014 sampai dengan 2018 sebesar 2,18% atau dapat dikatakan Sangat Efisien karena selalu pada persentase interval dibawah 10%, bahkan hampir selalu mengalami penurunan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2015 ada sedikit peningkatan. Pada tahun 2014 Rasio Efisiensinya sebesar 3,32%, kemudian tahun 2015 menjadi 3,38% , tahun 2016 sebesar 1,80%, tahun 2017 sebesar 1,39%, dan tahun 2018 sebesar 1,01%.

Total biaya pemungutan/yang dikeluarkan dalam program peningkatan dan pengoptimalan memperoleh PAD melalui penagihan pajak, retribusi, dan lainnya Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan dan penurunan, dimana dalam hal ini tentu semakin kecil atau turunnya total biaya pemungutan tentu semakin baik. Berawal dari tahun 2014 biaya pemungutan PAD sebesar

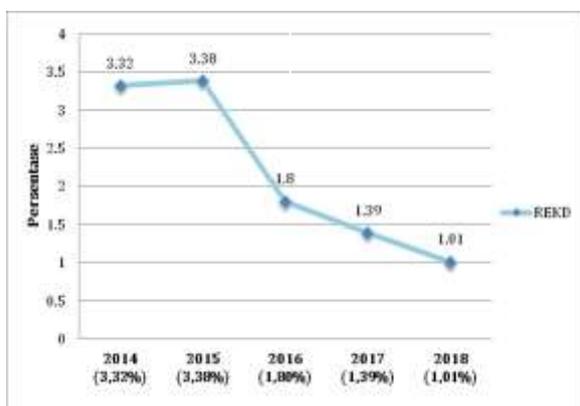
Rp.1.087.600.000. Mengalami kenaikan menjadi Rp.1.298.099.000 pada tahun 2015. Pada tahun 2016 biaya yang dikeluarkan menjadi Rp.789.156.000 turun dari tahun sebelumnya. Kemudian tahun berikutnya, yakni tahun 2017 mengalami penurunan kembali menjadi Rp.686.480.000, dan pada tahun 2018 biaya pemungutan PAD ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi Rp.890.548.000.

Rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan tergolong Sangat Efisien karena rata-rata rasionya tadi adalah 2,18%, ini berarti biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk memperoleh PAD sangat kecil dibandingkan realisasi PAD. Dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam hal program peningkatan dan pengoptimalan PAD melalui penagihan pajak, retribusi, dan lainnya sangat baik, karena realisasi PAD yang diterima jauh sangat besar apabila dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya. Untuk kedepan, diharapkan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat mempertahankan apa yang telah dicapai ini dan dapat terus terjadi peningkatan efisiensi.



DOI 10.34010/agregasi.v9i2.5396

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>



Gambar 3. Grafik Rasio Efisiensi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 – 2018

Rasio Aktivitas Kabupaten Barito Selatan

Menurut Halim (2012:235), rasio ini menggambarkan perbandingan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja tidak langsung) dan belanja pembangunan (belanja langsung) secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil, karena terfokus pada belanja rutin, padahal belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi.

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang

ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan Pemerintah Daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah (Halim, 2012).

Tabel 7. Penghitungan Rasio Belanja Rutin

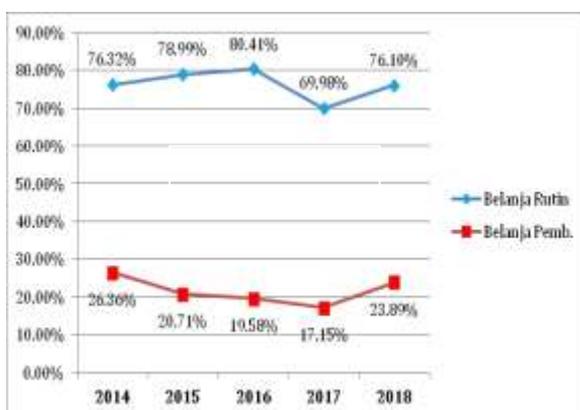
T.A.	Total Belanja Rutin	Total APBD	RBR (%)
2014	589.359.705.425	772.158.024.249	76,32
2015	679.029.014.195	859.607.356.407	78,99
2016	671.155.939.135	834.638.347.479	80,41
2017	545.015.123.952	778.896.818.699	69,98
2018	651.033.647.508	855.483.957.209	76,10
Rata-rata per tahun = 76,36			

Sumber: Data diolah, 2019.

Tabel 8. Penghitungan Rasio Belanja

T.A.	Total Belanja Pembangunan	Total Belanja Daerah	RBP (%)
2014	180.415.462.223	772.158.024.249	23,36
2015	178.068.642.812	859.607.356.407	20,71
2016	163.482.408.343	834.638.347.479	19,58
2017	133.616.784.497	778.896.818.699	17,15
2018	204.359.109.701	855.483.957.209	23,89
Rata-rata per tahun = 20,93			

Sumber: Data diolah, 2019.



Gambar 4. Grafik Rasio Aktivitas Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 – 2018

Diketahui bahwa rata-rata Rasio Aktivitas belanja rutin atau belanja tidak langsung Kabupaten Barito Selatan sebesar 76,36%. Pada tahun 2014 rasionya sebesar 76,32%, kemudian pada tahun 2015 ada peningkatan menjadi 78,99%, dan meningkat kembali menjadi 80,41% pada tahun 2016. Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 69,98%, dan setelahnya terakhir pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 76,10%. Sedangkan untuk rata-rata Rasio Aktivitas Belanja Pembangunan Kabupaten Barito Selatan sebesar 20,93%. Pada tahun 2014 rasionya sebesar 23,36%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 20,71%, dan mengalami penurunan menjadi 19,58% pada tahun 2016. Tahun 2017 mengalami penurunan kembali menjadi 17,15%, dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan dan merupakan yang tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya menjadi 23,89%. Hal ini

berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sedikit menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Langsung seperti: belanja operasional kantor dan belanja modal seperti pembangunan di sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, dan perbaikan infrastuktur.

Dari perhitungan rasio aktivitas terlihat bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Barito Selatan masih diprioritaskan untuk kebutuhan Belanja Rutin (BTL) sehingga rasio Belanja Pembangunan (BL) terhadap total APBD masih relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja rutin yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja pembangunan. Besarnya alokasi dana untuk belanja rutin terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji ASN. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum terlalu dapat fokus pada pembangunan daerah.

Dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja belanja pembangunan, dan hanya diketahui sebatas belanja pembangunan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi (Hari Adi, 2016), sehingga Pemerintah Daerah masih

berkonsentrasi pada pemenuhan belanja rutin yang mengakibatkan belanja pembangunan untuk Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kecil atau belum terpenuhi secara maksimal. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati atau dilihat langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik secara menyeluruh. Tapi tidak bisa kita pungkiri pula dalam belanja rutin sebenarnya juga ada pembiayaan yang dirasakan dampaknya oleh masyarakat seperti dana BOS, belanja bantuan sosial, dan BPJS.

Belanja rutin yang besar ini juga disebabkan gaji pegawai, yang mengindikasikan jumlah tenaga kerja yang ada sangat besar pula. Menurut Winarna (2010) dalam Taryoko (2016:22) Jumlah Tenaga Kerja merupakan sumber daya potensial sebagai penggerak, penggagas dan pelaksana di suatu daerah, sehingga sumber daya ini dapat menentukan maju atau mundurnya daerah yang bersangkutan tidak terkecuali didalamnya adalah Pegawai/Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berangkat dari hal tersebut, jelas bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperbaiki dalam perencanaan pengeluaran sebagaimana menurut Mardiasmo (2018:129). Pertama, konsep

batas maksimal yang ada pada pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan harus diganti karena ini telah menjadi dasar bagi unit kerja pemerintahan di daerah untuk menghabiskan anggaran tanpa arah yang jelas. Kedua, konsep traditional budget yang biasa dilakukan sehingga membatasi jenis-jenis pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan harus sudah diganti untuk memungkinkan munculnya jenis-jenis pengeluaran yang lebih rasional sesuai dengan kebutuhan daerah. Idealnya jenis pengeluaran harus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan yang ada di lingkup daerahnya. Sedangkan fungsi Pemerintah atasan hanya memberikan tuntutan umum (koridor) sebagai dasar acuan. Ketiga, untuk mengidentifikasi kebutuhan dana utamanya pada pos pengeluaran rutin, ukuran kinerja yang sederhana adalah beban kerja (workload) dan biaya per unit (unit cost). Sedangkan untuk identifikasi kebutuhan pada pos pengeluaran pembangunan, ukuran kinerjanya pada umumnya lebih kompleks.

Rasio Pertumbuhan Kabupaten Barito Selatan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (Halim, 2012:241). Rasio

Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja Keuangan APBD mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah, dan akan mengetahui potensi mana yang perlu mendapat perhatian (Faud, 2018). Rasio Pertumbuhan ini dilakukan dengan melihat dua hal yakni Total Pendapatan Daerah (TPD) secara keseluruhan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap periode tahun.

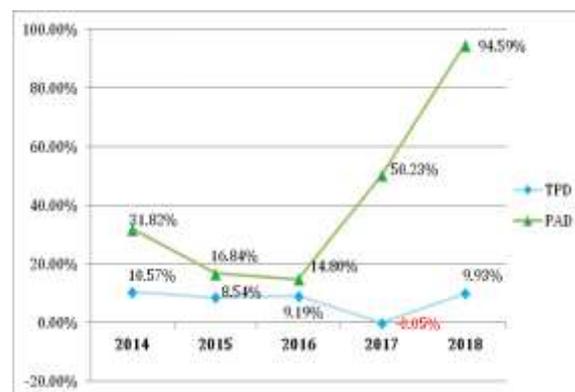
Dapat dilihat bahwa Pertumbuhan TPD mengalami pertumbuhan positif meskipun ada sedikit penurunan pada 2017 dari tahun sebelumnya sebagai pertumbuhan negatif sebesar -0,05%, serta untuk pertumbuhan TPD paling tinggi ada pada tahun 2014 sebesar 10,57%. PAD juga mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun dan selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Dan pertumbuhan PAD tertinggi ada pada tahun 2018 sebesar 94,59%, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 34,01%. Sebagaimana menurut Nyoman, dkk (2015) bahwa bahwa tingkat desentralisasi dan efisiensi pendapatan

asli daerah (PAD) memiliki efek positif pada belanja modal.

Tabel 9. Penghitungan Rasio Pertumbuhan (dalam ribuan)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TPD	708.451	786.346	853.554	932.033	931.583	1.024.136
Pertumbuhan		10,57%	14,36%	9,19%	-0,05%	9,93%
Rata-rata per tahun	8,80%					
PAD	24.893	32.814	38.343	44.019	49.297	95.927
Pertumbuhan		31,82%	16,84%	14,80%	11,98%	94,59%
Rata-rata per tahun	34,01%					

Sumber: Data diolah, 2019.



Gambar 5. Grafik Rasio Pertumbuhan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 – 2018

Jika dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun yang selalu dapat dikatakan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Barito Selatan (TPD) mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Tahun 2014 pendapatan tumbuh 10,57% dan merupakan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Tahun 2015 rasio pertumbuhan yaitu sebesar 14,36% dari tahun sebelumnya. Tahun 2016

sebesar 9,19%, dan pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan yang negatif karena ada penurunan pendapatan, rasio pertumbuhannya sebesar -0,05% hal ini terlihat dari proporsi APBD disebabkan menurunnya pendapatan transfer yang diterima dari tahun-tahun sebelumnya. Meski sempat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2017, nampaknya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan segera berbenah sehingga pada tahun 2018 kembali mengalami pertumbuhan positif yakni 9,93%. Adanya peningkatan yang terjadi secara umum karena terdapat peningkatan pada PAD, Dana Perimbangan (DP), Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LPDS). Sedangkan khusus pada tahun 2017 yang pertumbuhan pendapatannya -0,05%, penurunan ini sekali lagi lebih banyak disebabkan karena terjadi penurunan dari tahun sebelumnya pada sektor Pendapatan Transfer yang dalam hal ini adalah Dana Perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Upaya pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk selalu meningkatkan pendapatan daerahnya bisa dikatakan berhasil meskipun sebagian besar pendapatannya masih bersumber dari bantuan dari pihak pusat. PAD masih kecil dibandingkan dengan dan transfer atau bantuan dari pusat. Agar kedepannya kinerja daerah bisa meningkat dan optimal lagi maka seharusnya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan agar terus berupaya mengoptimalkan pendapatan

daerahnya dari sektor PAD yang sudah menjadi andalannya, dan terus meningkatkan potensi PAD lain yang masih kecil jumlahnya.

Meskipun dilihat secara rasio pertumbuhan khusus PAD untuk Kabupaten Barito Selatan selama lima tahun terakhir selalu meningkat bertumbuh positif, akan tetapi tidak dapat membawa dampak yang signifikan bagi kinerja keuangan daerah, karena PAD yang dihasilkan hanya meningkat tipis jauh dari mampu mengimbangi dana transfer yang didapat sehingga berpengaruh negatif bagi kemandirian daerah itu sendiri. Belum lagi PAD yang sangat tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan daerah hal ini sekali lagi dibuktikan dengan kecilnya sumbangsih PAD yang hanya mampu menutupi 6,30% dari total belanja daerah.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan harus selalu berupaya meningkatkan pendapatannya secara lebih lagi PAD nya dengan cara terus mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimilikinya dan benar-benar dengan serius memperketat regulasi terkait pemungutan pajak yang sudah ada agar tidak ada celah bagi pelanggar yang tidak ingin atau berkilah dalam kewajibannya membayar pajak. Sebagaimana yang diharapkan, tentu akan lebih baik apabila Pemerintah Daerah tidak terlalu bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat agar daerah dalam hal ini bisa mengelola daerahnya dengan potensi

PAD yang tinggi dan selalu mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahunnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data rasio dan pembahasan yang telah dilaksanakan terkait kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Dalam mencapai pada prinsip *performance budget*, Kabupaten Barito Selatan masih perlu peningkatan yang ekstra, karena orientasi anggaran yang tercermin dari tinjauan kelima rasio masih belum terfokus pada kepentingan publik sebagaimana seharusnya. PAD yang rendah sehingga mengakibatkan ketergantungan yang begitu besar dan juga dibuktikan dengan sumbangan PAD yang begitu kecil terhadap belanja daerah dan keefektifan kemampuan merealisasikan PAD juga masih belum maksimal sehingga berimplikasi dari segi efisiensi yang kinerjanya sangat efektif menjadi tidak terlalu memiliki dampak karena realisasi PAD yang didapat tadi cenderung tidak mencapai target anggaran, dimana pertumbuhan PAD yang positif selalu meningkat tiap tahunnya juga tidak memiliki pengaruh

signifikan belum mampu dijadikan patokan guna menunjang kinerja keuangan daerah Kabupaten Barito Selatan karena belum mampu membiayai pembiayaan belanja daerah secara maksimal. Dan sekali lagi hal tersebut menjadi penyebab jelasnya apabila dana transfer dijadikan modal utama bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahannya sehingga kemandirian tetap sangat rendah. Akan tetapi lebih dari itu semua, setidaknya meskipun secara tipis, kinerja atau kemampuan keuangan daerah Kabupaten Barito Selatan ada peningkatan yang dapat dijadikan semangat perbaikan ke depan.

2. Rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten Barito Selatan secara umum relatif stabil dari tahun-ketahun (2014-2018) dengan rata-rata sebesar 6,09%, dimana persentase ini masih dalam kriteria instruktif karena rasio kemandiriannya berada pada interval 0% - 25% meski mengalami peningkatan kemandirian setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan ketergantungan pendanaan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terhadap Pemerintah Pusat masih sangat tinggi sedangkan PAD yang dihasilkan masih sangat kecil sebagai akibat sumber-sumber keuangan potensial Negara adalah

- milik Pemerintah Pusat itu sendiri.
3. Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan bisa dikatakan cukup efektif karena rasio efektifitasnya berada pada interval 90% - 99%. Rata-rata per tahunnya adalah 91,47%. Kinerja efektivitas Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengalami kenaikan dan penurunan terus menerus dalam lima tahun terakhir, karena sering kali realisasi PAD tidak mencapai yang ditargetkan.
 4. Untuk rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tahun anggaran 2014-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan berada dalam kategori sangat efisien karena di interval < 10%, yaitu rata-rata per tahun 2,18%, disebabkan dengan biaya pemungutan PAD yang kecil dapat menghasilkan realisasi PAD yang sangat besar apabila keduanya dibandingkan.
 5. Rasio aktivitas dengan membandingkan belanja rutin atau belanja tidak langsung (BTL) terhadap total APBD Kabupaten Barito Selatan tahun 2014-2018 mengalami kecenderungan naik tipis dengan rata-rata rasio per tahun sebesar 76,36%. Sedangkan rasio aktivitas untuk belanja pembangunan atau belanja langsung (BL) tahun 2014-2018 mengalami kecenderungan menurun dengan rata-rata rasio per tahun sebesar 20,93%. Hal ini berarti sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Barito Selatan masih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan BTL secara khusus dalam hal ini disebabkan belanja pegawai yang begitu besar.
 6. Rasio pertumbuhan total pendapatan daerah (TPD) Kabupaten Barito Selatan tahun 2014-2018 mengalami kecenderungan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan TPD per tahun sebesar 8,80%. Akan tetapi terjadi sedikit saja penurunan yang menyebabkan pertumbuhan negatif pada tahun 2017 sebesar -0,05%. Sedangkan rasio pertumbuhan PAD tahun 2014-2018 juga menunjukkan trend kenaikan positif terus menerus dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 34,01%. Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa rasio pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah positif atau baik. Pertumbuhan dengan kecenderungan yang terus meningkat ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD melalui pajak dan retribusi daerah potensial.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan harus melakukan secara lebih optimal pelaksanaan pemungutan

- pajak dan retribusi daerah yang masih memiliki kontribusi kecil dalam PAD. Kemudian perluasan identifikasi potensi pajak terutama untuk menggali potensi yang sedang berkembang maupun yang akan berkembang seiring pembangunan yang berjalan di Kabupaten Barito Selatan serta sehingga potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sektor pendapatan pajak maupun retribusi daerah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan sebaiknya melakukan penetapan anggaran PAD yang didasarkan pada potensi daerah bukan sekedar didasarkan pada target PAD, sehingga perlu dilakukan penataan maupun sensus yang optimal dalam menggali potensi daerah yang ada.
 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan perlu melakukan reformasi pemungutan pajak dengan pengalihan sistem manual menuju berbasis teknologi, hal tersebut diperlukan agar transaksi pembukuan berlangsung secara transparan, akuntabel dan akurat.
 4. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan seharusnya mengoptimalkan semua aset tetap yang dimiliki untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan PAD.
 5. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan juga perlu memperkuat regulasi terkait retribusi pada potensi pendapatan retribusi yang sudah ada agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
 6. Pemerintah Daerah harus memberikan pemahaman secara lebih lagi terhadap masyarakat akan pentingnya pembangunan di Kabupaten Barito Selatan yang memungkinkan masuknya investor yang akan membantu pembangunan tersebut agar dapat diterima oleh masyarakat.
 7. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci dan akurat lagi dalam menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Dengan melakukan penambahan waktu dalam penelitian.
 8. Penelitian ke depan, disarankan untuk mengambil tema tentang “penggalan potensi PAD” dan disarankan juga untuk mengevaluasi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan penganggaran dan proses pembangunan sehingga dapat diketahui sejauh mana APBD suatu daerah itu berpihak untuk rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arun, Thankom. (2015). *Financial Inclusion: Policies and Practices*. IIMB Management Review. University of Central Lancashire.

- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Faud, Ramli. (2018). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Daerah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat
- _____. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2017). *Manajemen Keuangan Sektor Publik, Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hari Adi, Priyo. (2016). *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Daerah*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Jumingan. (2006). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Khusaini, Moh. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press.
- KS, Lazyra. 2016. *Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*. Jurnal Ilmu Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kurniati, Poni Sukaesih. (2013). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pada Era Reformasi*. Jurnal Ilmu Politik. Universitas Indonesia.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- _____. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi Tiga*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahsun, Mohamad. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.
- _____. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Good Governance Decentralization and Democracy Value for Money*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moelong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ni Nyoman, S, Made, S.U dan LN. Mahendra Yasa. (2015). *Dampak Kinerja Keuangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten /Kota Di Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. ISSN: 2337-3067.
- Pazri, Muhammad. (2016). *Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem*

Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. Jakarta. Jurnal Agregasi, Vol. 1, Issues 2, September: 259.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

_____. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

_____. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

_____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Saragih. 2003. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Ekonomi. Universitas Indonesia.

Sumbu, Telly. 2010. *Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*. Jurnal Hukum. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Yogyakarta: Alfabeta.

Taryoko. 2016. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wibisono, Nurharibu. 2011. *Analisis Kinerja dan Keberpihakan APBD Untuk*

Rakyat. Tesis. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

PROFIL SINGKAT

Anyualatha Haridison, Kelahiran Pangkalan Bun, 20 Juli 1980. Sarjana Filsafat Teologi STT GKE Banjarmasin tahun 2002, Magister Studi Pembangunan UKSW Salatiga tahun 2006. Saat ini adalah tenaga pengajar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Palangka Raya.

Diano Permana, Kelahiran Buntok (Barito Selatan), Tanggal 21 Juli 1997, Sarjana Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Palangka Raya Tahun 2020.



JURNAL AGREGASI
Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam
Demokrasi
Volume 9 – Nomor 2, November 2021, (Hlm 171-192)



DOI 10.34010/agregasi.v9i2.5396

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>
